



Banyak Wisatawan Terjebak Parkir Liar

■ Sekda DIY Beberkan Masalah Utama Selama Libur Nataru di Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Parkir liar dan tarif "nuthuk" menjadi keluhan utama wisatawan yang berlibur ke Yogyakarta pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, meski arus lalu lintas dinilai relatif lancar selama periode tersebut.

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan, persoalan parkir paling banyak disampaikan wisatawan dibandingkan kemacetan. Menurut dia, kelancaran lalu lintas selama Nataru merupakan hasil koordinasi lintas sektor dan dukungan kepolisian.

"Masukan dari wisatawan paling banyak itu soal parkir dan kemacetan. Tapi, sebenarnya untuk macet sendiri kemarin sudah lumayan terurai," ujar Ni Made di Yogyakarta, Jumat (2/1).

Ia menjelaskan, kemacetan di sejumlah ruas utama dapat dikendalikan selama puncak libur Nataru. Namun, praktik parkir liar di kawasan strategis justru masih marak dan memicu keluhan wisatawan, terutama di Jalan Mataram, sirip-sirip Malioboro, dan Jalan Pasar Kembang. Di lokasi tersebut, wisatawan yang tidak memahami area kerap terjebak parkir ilegal dengan tarif di luar ketentuan.

Pemerintah daerah disebutkan telah menyiapkan berbagai kantong parkir resmi dengan tarif yang jelas. Tujuh kantong parkir utama di antaranya di TKP Ngabean, TKP Eks Hotel Trio, TKP Beskalan, TKP Menara Kopi, TKP Ketandan, TKP Sriwedari, dan TKP Senopati. Selain itu, Pemkot Yogyakarta menambah kantong parkir di Stadion Kridosono, lahan selatan PLN di Jalan Margo Utomo, serta SMPN 3 Yogyakarta.

Meski demikian, masih banyak masyarakat dan wisatawan masih memilih par-

kir di lokasi ilegal, sehingga membuka ruang bagi praktik penarikan tarif berlebihan. "Kalau masyarakat mau menggunakan parkir yang sudah ditentukan pemerintah daerah, pastinya hal-hal yang berkaitan dengan nuthuk dan lain-lain itu tidak akan terjadi. Contohnya di Beskalan, di Ketandan, itu sudah jelas tarifnya, sekian jam, sekian rupiah," kata Ni Made.

Ia menegaskan, parkir di badan jalan memang diperbolehkan sesuai peraturan daerah, tetapi harus berizin dan diatur secara ketat. Pihak swasta pun dipergunakan membuka layanan parkir selama mematuhi ketentuan tarif dan tidak melampaui batas yang ditetapkan.

Menurut Ni Made, akar persoalan parkir liar bukan hanya soal ketersediaan ruang, melainkan perizinan dan kesadaran bersama. "Potensi parkir sebenarnya cukup banyak, cuma persoalannya berizin atau tidak. Kalau berizin, itu lebih bagus," ujarnya.

Gudeg mahal
 Sementara itu, sebuah unggahan oleh wisatawan yang mengeluhkan harga tiga porsi gudeg sebesar Rp85.000, viral di media sosial. Harga tersebut dinilai terlalu mahal bagi sebagian pelancong yang berkunjung ke Kota Gudeg.

Menanggapi hal itu, Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (PKCB) Kota Yogyakarta Fitria Dyah Anggraini menilai harga tersebut sebenarnya masih dalam batas wajar, karena banderol di tiap lokasi bervariasi. "Kalaupun itu normal enggak sih. He'eh ya kan, tapi ya memang mungkin berbeda ya," kata Fitria, dikutip dari *Kompas.com*, Jumat.

Ia menambahkan, harga yang dikeluhkan tersebut

PERSOALAN LAMA

- Parkir liar dan tarif "nuthuk" menjadi keluhan utama wisatawan yang berlibur ke Yogyakarta pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
- Sekretaris Daerah DIY mengatakan, praktik parkir liar masih marak di kawasan strategis, terutama di Jalan Mataram, sirip-sirip Malioboro, dan Jalan Pasar Kembang.
- Di lokasi tersebut, wisatawan yang tidak memahami area kerap terjebak parkir ilegal dengan tarif di luar ketentuan.

bahkan tergolong rendah jika dibandingkan dengan warung gudeg legendaris atau restoran ternama di Yogyakarta. Namun, ia memahaminya adanya benturan antara harga di lapangan dengan ekspektasi wisatawan yang menginginkan kuliner dengan harga jauh lebih murah dibanding destinasi wisata lainnya di Indonesia.

"Kami untuk UPT sendiri kan tidak berada dalam rana untuk bisa mengontrol harga," ujar Anggi.

Pihaknya selalu mengimbau wisatawan untuk makan di restoran atau gerai yang sudah jelas mencantumkan daftar harga di menu, untuk menghindari kesalahpahaman saat membayar. Anggi memastikan bahwa pedagang di pusat relokasi seperti Teras Malioboro dari pertokoan resmi selalu dalam pengawasan. Pihak Balai Layanan Usaha Teras Malioboro serta Dinas Pariwisata terus memantau agar pedagang tetap mencantumkan label harga secara terbuka. (**han/kpc**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005